

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa struktur yang memberdayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menerima program dan tidak tergraduasi terdiri dari data penerima PKH diambil dari data Bantuan Langsung Tunai, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat menyediakan formulir keberatan digraduasi, adanya sistem naik di jalan bagi penerima PKH, syarat-syarat PKH memberikan peluang bagi RTSM yaitu satu komponen syarat penerima PKH memberikan peluang bagi RTSM, komponen ibu hamil/mempunyai balita memungkinkan penerima PKH menerima secara berkelanjutan, status kepemilikan rumah dan munculnya aturan bantuan PKH untuk Anak Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2016. Selain itu penerima PKH merasa bangga dalam menerima bantuan PKH.

Adapun strategi peserta PKH untuk menerima program dan tidak tergraduasi terdiri dari meminta rekomendasi kepada pemerintahan nagari yaitu meminta rekomendasi kepada wali nagari dan meminta rekomendasi kepada wali jorong, meminta bantuan kepada pendamping PKH, meminta bantuan kepada ketua kelompok PKH, mencari informasi penerima PKH yang digraduasi yaitu mencari informasi kepada pendamping PKH dan mencari informasi kepada ketua kelompok PKH, melaporkan penerima PKH yang dianggap sudah mampu secara ekonomi, mematuhi

kewajiban penerima PKH, mengisi formulir keberatan atas hasil resertifikasi serta berpura-pura miskin.

6.2. Saran

1. Kepada Pemerintahan Nagari agar terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Nagari Punggasan Timur karena semenjak tahun 2007 Pemerintahan Nagari tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan PKH. Begitu juga dengan keterlibatan pemerintahan nagari dalam bantuan kemiskinan lainnya agar program kemiskinan tepat sasaran dan tidak hanya terpaku dengan data Badan Pusat Statistik saja, karena berdasarkan wawancara di lapangan dengan Wali Nagari bahwa data bantuan kemiskinan kurang valid contohnya ada nama orang yang telah lama meninggal dunia dan telah pindah dari Nagari Punggasan Timur. Salah satu bentuk keterlibatan pemerintahan nagari yaitu dilibatkan dalam pendataan penduduk untuk program kemiskinan. Adapun tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan kegagalan program karena bagaimanapun juga kondisi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintahan nagari.
2. Kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar bersifat objektif dalam menentukan RTSM penerima PKH agar program terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Artinya, pendamping PKH harus pandai menentukan RTSM penerima PKH yang layak dan tidak layak menerima program sesuai dengan kriteria yang ditentukan baik berdasarkan komponen atau kondisi ekonomi RTSM. Jika RTSM tidak memenuhi syarat baik secara komponen persyaratan atau kondisi ekonomi meningkat maka pendamping PKH wajib melakukan graduasi secara cepat.

3. Kepada Pemerintah Pusat agar membuat aturan terkait bantuan PKH khusus berlaku bagi RTSM yang mempunyai anak balita dengan membatasi jumlah balita yang mendapatkan bantuan PKH dalam satu RTSM terhitung semenjak mendapatkan PKH. Misalnya hanya berlaku bagi anak balita yang pertama lahir sampai balita yang ketiga, sedangkan bagi balita yang keempat tidak berlaku lagi untuk mendapatkan bantuan PKH. Semenjak tahun 2007, di Nagari Punggasan Timur aturan seperti ini belum ada dan program telah berlangsung lama sekitar 9 tahun. Selama ini telah ada penerima PKH yang telah melahirkan anaknya yang ke empat selama menerima program PKH dan mendapatkan bantuan PKH. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar RTSM tidak termotivasi untuk sering melahirkan anak/mempunyai anak banyak karena mengharapkan bantuan PKH yang pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan kepada program kemiskinan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tentang *“Hambatan Kultural dan Struktural dalam Pelaksanaan Kewajiban Peserta PKH”*. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara di lapangan bahwa ada beberapa kewajiban peserta PKH yang telah lama tidak berjalan di Nagari Punggasan Timur, seperti kegiatan keagamaan berupa santapan rohani dengan mengundang ustadz , penyuluhan KB dan melakukan gotong royong atau bakti sosial, padahal kegiatan ini wajib dilakukan oleh peserta PKH dan kalau tidak maka akan mendapatkan sanksi berupa pemotongan bantuan sebesar 10%. Pada awal tahun penerimaan bantuan PKH kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan lancar. Namun pada saat ini,

kewajiban yang masih berjalan hanyalah perkumpulan dengan pendamping sekali sebulan dan melakukan posyandu.

